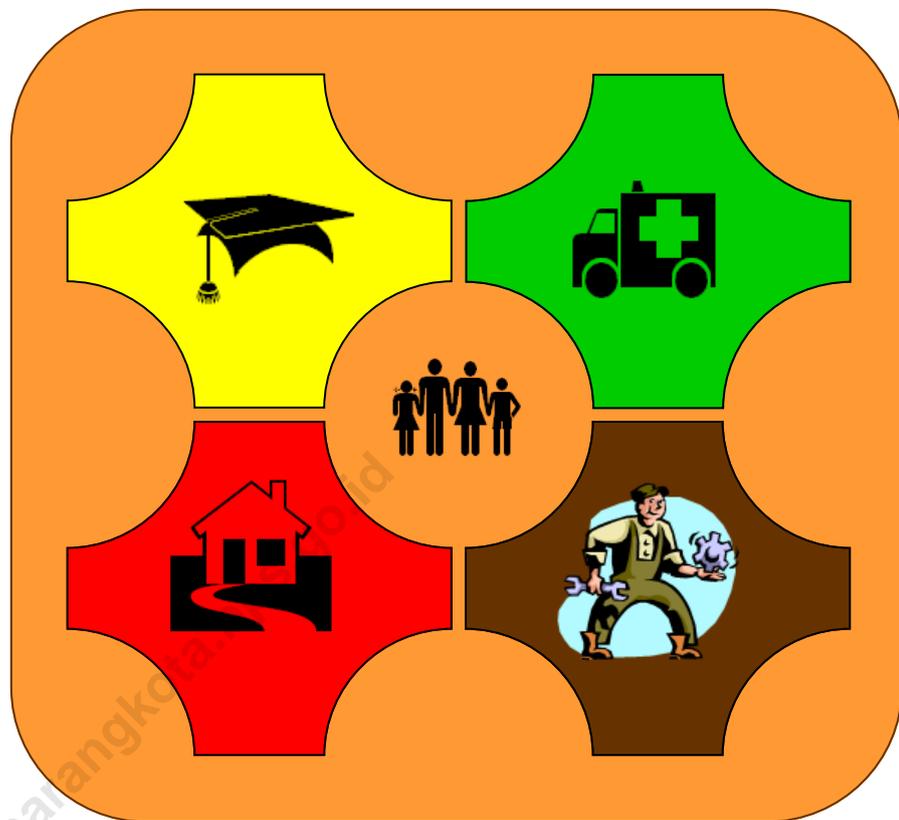




**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA SEMARANG 2009**



**Kerjasama
Bappeda Kota Semarang dan
Badan Pusat Statistik Kota Semarang**

KATA PENGANTAR

Disadari bahwa istilah kesejahteraan sebenarnya mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Isi dari publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan yang luas itu dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2009 ini menyajikan gambaran taraf kesejahteraan rakyat di Kota Semarang, perkembangannya antar waktu dan perbandingannya antar daerah. Sumber data yang digunakan adalah data mutakhir yang tersedia di Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan dari instansi lain di luar BPS.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran dari pemakai data sangat kami harapkan demi kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Akhirnya kami berharap bahwa buku ini bermanfaat sebagai salah satu acuan dalam menentukan skala prioritas perencanaan program-program pembangunan.

KEPALA BPS KOTA SEMARANG,

Dra. SITI SEDYATI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19570217.198303.2.001

DAFTAR ISI

	<u>halaman</u>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Pengertian Indikator.....	2
3. Indikator Kesejahteraan Rakyat.....	4
BAB. II. INDIKATOR BIDANG KEPENDUDUKAN	
1. Jumlah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk.....	8
2. Komposisi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin	11
3. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan	15
BAB. III. INDIKATOR BIDANG KESEHATAN	
1. Keluhan Kesehatan	19
2. Penolong Kelahiran	20
3. Keluarga Berencana	22
4. Balita dan Ibu Menyusui	23
BAB. IV. INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN	
1. Rasio Murid-Guru	27
2. Partisipasi Sekolah	28
3. Kemampuan Baca Tulis dan Tingkat Pendidikan	29
BAB. V. INDIKATOR BIDANG KETENAGAKERJAAN	
1. Angkatan Kerja dan Pengangguran	31
2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	33
BAB. VI. INDIKATOR BIDANG PERUMAHAN	
1. Kondisi Perumahan	36
2. Kualitas Perumahan	39

DAFTAR TABEL

	<u>halaman</u>
Tabel 1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang.....	8
Tabel 2. Jumlah Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Semarang	9
Tabel 3. Persentase Wanita Umur 15-49 tahun menurut Status Perkawinan	16
Tabel 4. Persentase Penduduk yang pernah mengalami keluhan kesehatan	20
Tabel 5. Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran	21
Tabel 6. Persentase Wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin menurut Partisipasi Keluarga Berencana	22
Tabel 7. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru menurut jenjang Pendidikan tahun 2009	28
Tabel 8. Nilai APK, APM menurut jenjang pendidikan tahun 2008-2009 ..	29
Tabel 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	33
Tabel 10. Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan	35
Tabel 11. Persentase rumah menurut jenis atap	37
Tabel 12. Beberapa Indikator Kualitas Rumah	38

DAFTAR GAMBAR

	<u>halaman</u>
Gambar 1. Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2009.....	12
Gambar 2. Persentase Penduduk 10 Tahun keatas menurut Status Perkawinan	15
Gambar 3. Jumlah Balita menurut lamanya disusui	24
Gambar 4. persentase Penduduk menurut Pendidikan yang ditamatkan ..	30

<https://semarangkota.bps.go.id>

1. Latar Belakang

Usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama pembangunan kita. Usaha ini dibarengi dengan segala daya untuk meletakkan landasan yang kuat agar supaya pembangunan tahap-tahap berikutnya dapat menjadi lebih terarah dan lancar. Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap dan komponennya. Data yang diperlukan dengan sendirinya haruslah mempunyai beberapa persyaratan, yaitu kaitannya yang sangat tinggi dengan tujuan pembangunan itu sendiri, dapat disajikan tepat pada waktu yang diperlukan dan mampu mencerminkan hal-hal yang benar terhadap gejala yang sedang terjadi.

Oleh karena kebutuhan yang sifatnya terus menerus dan dalam segala bidang itulah usaha pembangunan dibarengi juga dengan kebutuhan untuk setiap kali menyempurnakan dan mengembangkan data statistik yang ada. Usaha ini dengan sendirinya mempunyai tujuan yang cukup luas, karena akan meliputi tidak saja usaha memperbanyak macam data yang dikumpulkan dan disajikan, tetapi juga ruang lingkup, kualitas, organisasi pengumpulan dan tidak kalah pentingnya para tenaga yang menangani pengembangan statistik itu sendiri.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2009 ini mencoba memberikan materi yang dipandang cukup mempunyai hubungan yang erat dengan usaha pembangunan dibidang sosial. Usaha ini perlu dikembangkan dan data statistik yang disajikan terus menerus diamati dan disempurnakan.

2. Pengertian Indikator

Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat, sering menuntut adanya ukuran baku. Dalam ilmu-ilmu sosial salah satu masalah pokok pengembangan ukuran baku itu adalah soal kuantifikasi. Tidak semua masalah sosial mudah dikuantifikasikan. Bahkan sisi paling peka dalam problematik sosial lazimnya mustahil diukur secara angka, misalnya solidaritas sosial, tenggang rasa, gotong royong, ketahanan sosial dan lain sebagainya.

Secara umum langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kualitatif, adalah dengan memahami dengan benar konsep dan definisi dan kesepakatan batasan baku masalah yang hendak diukur. Walaupun konsep dan definisi itu berhasil dirumuskan, tidak bisa dijamin bahwa konsep tersebut dapat memberikan arti yang utuh. Namun demikian masih ada beberapa variabel atau tolok ukur kualitatif bidang sosial yang bisa dibuat ukuran kuantitatif atau yang sering disebut dengan indikator.

Indikator merupakan suatu petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan yang merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel tersebut terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung.

Indikator yang baik harus dapat memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

- a. Sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut;
- b. Obyektif, untuk hal yang sama indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda;
- c. Sensitive, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator;
- d. Spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya dari satu indikator, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan dari indikator Angka Harapan Hidup, indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan indikator daya beli masyarakat.

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti : rasio murid-guru, rasio dokter-penduduk dll.
- b. Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: TPAK, Angka Partisipasi Murni, dan sebagainya.

- c. Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu kegiatan telah berjalan, seperti : angka harapan hidup, TPAK dll.

Indikator input, proses, dan output/outcome tidak selalu dapat secara jelas dipisahkan karena suatu output/outcome dari suatu program dapat saja merupakan input untuk program lainnya.

Ukuran-ukuran yang sering digunakan dalam indikator :

- a. Jumlah, misalnya jumlah penduduk tahun 2009
- b. Rasio, yang merupakan suatu perbandingan antara dua bilangan dan dapat dinyatakan dalam persentase, misalnya : rasio jenis kelamin, rasio murid-guru dll
- c. Proporsi, yang menyatakan suatu perbandingan antara suatu bagian bilangan (jumlah) dengan bilangan/jumlah keseluruhan.
- d. Angka/Tingkat adalah jumlah unit yang mengalami suatu peristiwa/kejadian dibandingkan dengan jumlah unit yang berpeluang mengalami/mempunyai resiko peristiwa tersebut. Angka/Tingkat ini merupakan suatu bentuk khusus dari rasio atau proporsi. Misalnya : Angka Kelahiran Kasar, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dll.

3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Sejalan dengan pengertian umum diatas, maka Indikator Kesejahteraan Rakyat (kesra) dapat didefinisikan sebagai berikut :

Indikator Kesejahteraan Rakyat adalah ringkasan dari serangkaian data statistik kesejahteraan yang diturunkan dan disusun untuk menggambarkan suatu keadaan atau kecenderungan keadaan-keadaan kesejahteraan yang menjadi atau akan menjadi pokok perhatian atau usaha pembangunan masyarakat.

Salah satu kegunaan terpenting dari suatu indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) adalah untuk membandingkan tingkat kesejahteraan beberapa kelompok masyarakat baik menurut golongan, negara/daerah, maupun waktu. Bagi para penentu kebijakan, suatu ukuran perbandingan yang dapat menggambarkan secara menyeluruh keadaan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan. Hasil pengukuran ini haruslah merupakan hal yang sederhana dan mudah diartikan sehingga mereka segera dapat membaca keadaan kesejahteraan secara global dan membuat evaluasi.

Dengan memperhatikan fokus, masalah dan pembatasan yang telah diuraikan diatas, maka disusunlah serangkaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang yang terbagi menjadi beberapa bidang pembahasan, yaitu :

- a. Indikator Bidang Kependudukan
- b. Indikator Bidang Kesehatan
- c. Indikator Bidang Pendidikan
- d. Indikator Bidang Ketenagakerjaan
- e. Indikator Bidang Perumahan .

Penggolongan diatas sejauh mungkin disesuaikan dengan pembedangan usaha pembangunan dibidang sosial, yang sekaligus telah mencakup aspek-aspek perikehidupan masyarakat serta penduduk pada umumnya dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

<https://semarangkota.bps.go.id>

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis, karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia diperlukan karena jumlah penduduk yang besar hanya dapat merupakan modal atau aset pembangunan jika kualitasnya baik, sebaliknya hanya akan menjadi beban manakala kualitasnya rendah.

1. Jumlah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2009 tercatat sebesar 1.506.924 jiwa. Dengan jumlah sebesar itu Kota Semarang termasuk dalam 5 (lima) besar Kabupaten/Kota yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 4 (empat) wilayah lainnya adalah Kabupaten Brebes, kemudian disusul Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Tegal.

Perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk selama 6 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terus mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat pada tabel.1 dimana selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2006 laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan, dan kembali menanjak pada periode 2007-2008 mengalami kenaikan kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2009. Namun pertumbuhan penduduk tersebut masih cukup tinggi, hal ini bisa terjadi mengingat daya tarik Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pusat pendidikan.

Potensi permasalahan jumlah penduduk yang besar dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang dimiliki. Bila jumlah penduduk yang besar sedangkan tingkat pertumbuhannya tinggi, maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya menjadi sangat berat.

Tabel 1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2004	1.399.133	1,52
2005	1.419.478	1,45
2006	1.434.025	1,02
2007	1.454.594	1,43
2008	1.481.640	1,86
2009	1.506.924	1,71

Sumber : BPS Kota Semarang

Tingkat pertumbuhan penduduk dibedakan atas tingkat pertumbuhan alamiah dan tingkat pertumbuhan karena migrasi atau perpindahan. Tingkat pertumbuhan alamiah secara sederhana dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang lahir dan mati. Pada periode waktu tertentu digambarkan dengan Angka Kelahiran Kasar atau *Crude Birth Rate* (CBR) dan Angka Kematian Kasar atau *Crude Death Rate* (CDR) yang merupakan perbandingan antara jumlah kelahiran dan kematian dengan jumlah penduduknya selama periode satu tahun.

Tabel 2. Jumlah Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Semarang

Tahun	Kelahiran	Kematian	CBR	CDR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2004	17.563	7.323	12.64	5.27
2005	21.445	9.023	15,23	6,41
2006	22.125	9.002	15,10	6.35
2007	22.838	10.018	16.06	7.04
2008	24.472	10.018	16,60	6,79
2009	25.471	10.448	17,01	6,98

Sumber : BPS Kota Semarang

Selama periode enam tahun terakhir (tahun 2004–2009) perkembangan kelahiran menunjukkan pola meningkat, hal ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa pengendalian jumlah kelahiran harus terus diupayakan sedangkan kematian penduduk tidak mengikuti pola tertentu.

Sebagai gambaran, pada tahun 2009 angka CBR sebesar 17,01, angka ini dapat diartikan bahwa setiap 1.000 penduduk bertambah sekitar 17 orang karena kelahiran. Sedangkan angka CDR sebesar 6,98, angka ini dapat diartikan bahwa setiap 1.000 penduduk selama kurun waktu satu tahun jumlah penduduk berkurang 7 jiwa karena meninggal. Dengan demikian selisih dari keduanya adalah sebesar 10 orang tiap seribu penduduk, bila angka tersebut dinyatakan dalam persen maka nilainya menjadi 0,99%, merupakan angka pertumbuhan penduduk alamiah atau *Rate of Natural Increase* (RNI).

Mengenai tingkat pertumbuhan karena perpindahan (*net migration*), dihitung dengan melihat selisih antara angka penduduk yang datang (*in migration*) dan angka penduduk yang pergi (*out migration*). Pada tahun 2009 tingkat migrasi masuk sebesar 24,62, angka ini dapat diartikan bahwa dalam kurun waktu 1(satu) tahun wilayah kota Semarang kedatangan penduduk sebanyak 25 orang pada tiap 1000 penduduk, sedangkan tingkat migrasi keluar sebesar 22,07 per 1.000 penduduk. Bila migrasi masuk dikurangi dengan migrasi keluar diperoleh angka sebesar 2,55 atau 0,26 persen, angka inilah yang dinamakan dengan angka pertumbuhan penduduk karena migrasi (*net migration rate*). Keadaan ini tentu saja sangat logis, mengingat Kota Semarang sebagai ibukota provinsi berpotensi sebagai daerah tujuan penduduk baik dalam hal pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan lain-lain.

Penyebaran penduduk perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungannya. Sebagai kota besar, Semarang tergolong mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, pada tahun 2009 ini kepadatan penduduknya sebesar 4.032 jiwa per km², sedikit mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2008. Bila dilihat tiap Kecamatan terdapat 6 (enam) Kecamatan yang mempunyai kepadatan dibawah angka rata-rata Semarang, yang paling kecil adalah Kecamatan Tugu sebesar 868 jiwa per km² diikuti dengan Kecamatan Mijen (887 jiwa/km²), Kecamatan Gunungpati (1.267 jiwa/km²), Kecamatan Tembalang (2.948 jiwa/km²), Kecamatan Ngalian (2.967 jiwa/km²), dan Kecamatan Genuk (3.034 jiwa/km²). Dari keenam Kecamatan tersebut tiga diantaranya merupakan daerah pertanian dan perkebunan, sedangkan tiga Kecamatan lainnya merupakan daerah pengembangan industri. Namun sebaliknya untuk

Kecamatan-Kecamatan yang terletak di pusat kota, dimana luas wilayahnya tidak terlalu luas namun jumlah penduduknya sangat banyak menyebabkan kepadatan penduduknya sangat tinggi. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.437 jiwa per km², diikuti oleh Kecamatan Candisari (12.309 jiwa/km²), Kecamatan Semarang Tengah (11.981 jiwa/km²), Kecamatan Gayamsari (11.960 jiwa/km²), dan Kecamatan Semarang Utara (11.610 jiwa/km²).

2. Komposisi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

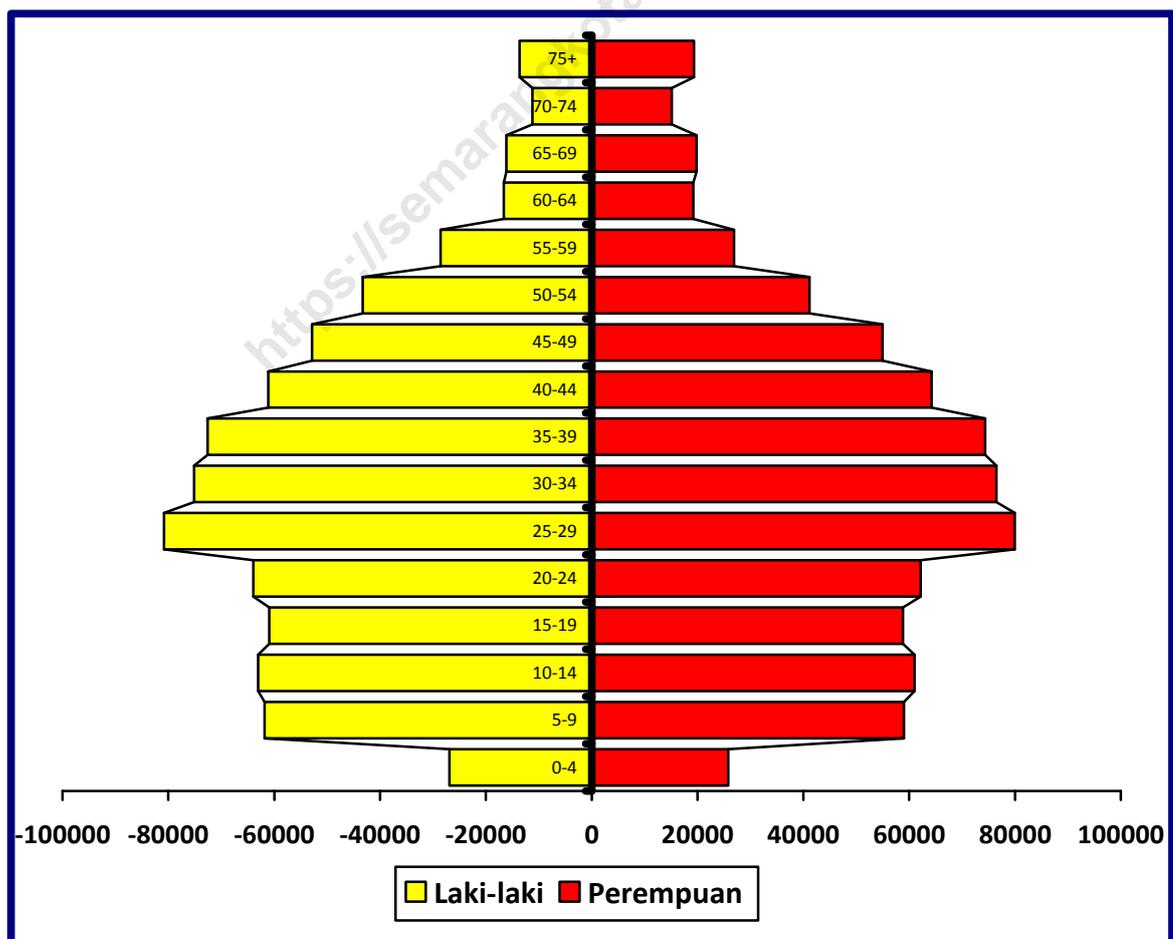
Selain jumlah, kepadatan maupun pertumbuhan penduduk, hal lain yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, antara lain komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dikatakan penting karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Kelahiran menurut jenis kelamin jelas berbeda, pada saat dilahirkan umumnya jumlah bayi pria lebih banyak dari bayi wanita.

Perbedaan kematian juga berbeda menurut umur, yaitu resiko kematian sangat tinggi pada kelompok umur kurang dari satu tahun. Usia harapan hidup juga berbeda menurut jenis kelamin yaitu wanita cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara perpindahan penduduk lebih banyak dilakukan oleh kelompok usia produktif dan lebih banyak dilakukan laki-laki dibandingkan perempuan terutama migrasi untuk jarak tempuh yang jauh. Namun sepertinya pola ini akan mengalami pergeseran seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri.

Struktur Umur Penduduk

Berbagai cara dilakukan untuk menggambarkan struktur penduduk menurut umur, diantaranya adalah dengan distribusi frekwensi, distribusi presentase, rasio dan grafik batang atau piramida penduduk. Dari penduduk menurut umur tersebut dapat dihasilkan beberapa indikator yang salah satunya adalah Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*), yang menggambarkan beban penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Gambar 1. Piramida Penduduk Kota Semarang, Tahun 2009



Salah satu cara yang biasa digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah dengan piramida penduduk (lihat gambar 1). Bentuk piramida penduduk dari suatu wilayah pada tahun tertentu dapat mencerminkan dinamika kependudukan di wilayah tersebut, seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Suatu wilayah dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya besar kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Sedangkan pada wilayah dengan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah mempunyai bentuk piramida dengan alas yang tidak begitu besar dan tidak langsung mengecil hingga puncaknya.

Bentuk piramida penduduk Kota Semarang pada tahun 2009 terlihat alas piramidanya tidak terlalu besar, hampir sama dengan bagian tengah piramida. Hal ini bisa diartikan bahwa tingkat kelahiran dan migrasi masuk walaupun masih cukup tinggi namun sudah ada pengendalian. Sedangkan bagian puncak piramida tidak terlalu runcing yang berarti pengendalian terhadap kematian penduduk cukup berhasil.

Angka Beban Ketergantungan

Angka beban ketergantungan memberikan gambaran perbandingan antar jumlah penduduk yang produktif (15-64 tahun) dengan yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Untuk penduduk yang mempunyai struktur muda atau sangat tua sekali, maka beban ketergantungannya sangat tinggi. Di negara-negara berkembang karena struktur umur penduduknya muda, maka angka beban ketergantungannya biasanya relatif tinggi.

Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2009 sebesar 35,24 persen, sedangkan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 26,70 persen dan angka ketergantungan penduduk tua sebesar 8,54 persen.

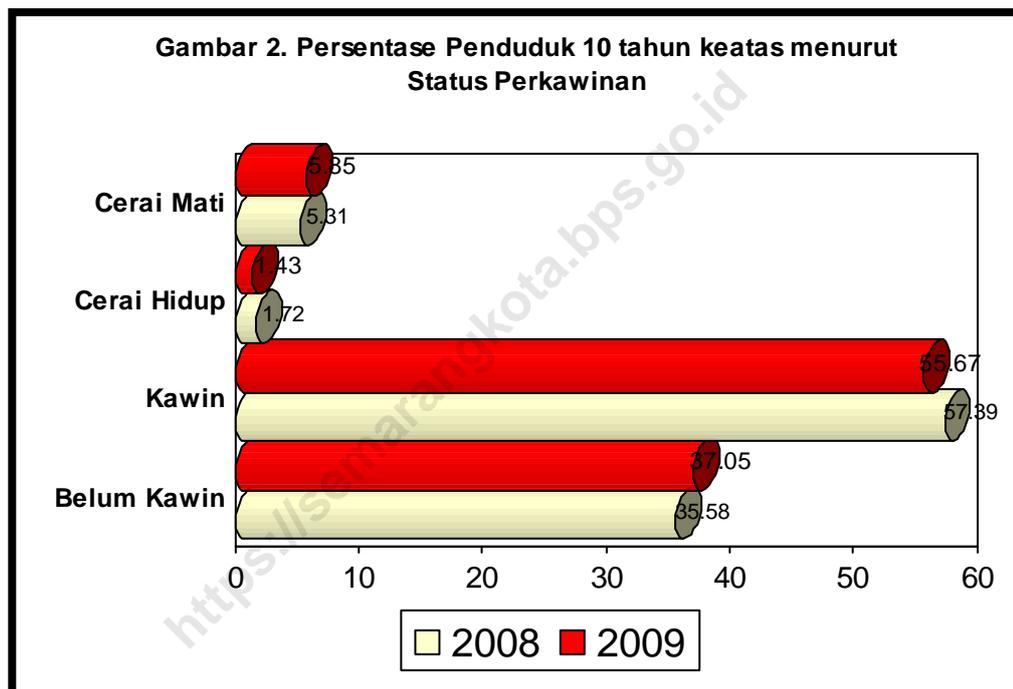
Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka beban ketergantungan total, ketergantungan muda maupun ketergantungan tua tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yakni masing-masing sebesar 32,23 persen, 26,66 persen dan 8,57 persen.

Rasio Jenis Kelamin

Selain menurut umur komposisi penduduk juga dapat dilihat menurut jenis kelamin. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut dengan rasio jenis kelamin (sex ratio). Dari 1.506.924 jiwa penduduk Kota Semarang pada tahun 2009, sebanyak 748.515 jiwa diantaranya adalah penduduk laki-laki dan 758.409 penduduk perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Semarang sebesar 99, yang artinya jumlah penduduk perempuan 1 persen lebih banyak dari penduduk laki-laki atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Sedangkan wilayah kecamatan yang mempunyai rasio jenis kelamin diatas 100 ada sebanyak 4 (empat) kecamatan, yang paling tinggi adalah Kecamatan Kecamatan Tembalang (102) , kemudian Mijen (101), Kecamatan Gajahmungkur (101) dan Kecamatan Gunungpati (101) berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

3. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Status perkawinan penduduk dibedakan atas belum kawin (single), kawin (married), cerai (divorce), janda dan duda (widow). Penduduk menurut status perkawinan dapat pula dibedakan menurut jenis kelamin, tempat tinggal serta kelompok umur tertentu.



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi penduduk umur 10 tahun keatas menurut status perkawinan relatif tidak mengalami perubahan dari tahun-ketahun. Sedangkan kalau dibandingkan antar tahun pada tiap-tiap status perkawinan, tampak terdapat penurunan pada status kawin, cerai hidup, sedangkan penduduk berstatus belum kawin dan cerai mati mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009.

Status perkawinan untuk penduduk wanita terutama ditujukan pada kelompok umur 15-49 tahun sangat penting untuk dianalisis, hal ini berkaitan

dengan potensinya untuk melahirkan yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk.

Tabel 3. Persentase wanita umur 15-49 tahun menurut status perkawinan

Status Perkawinan	Tahun 2008	Tahun 2009
(1)	(2)	(3)
1. Belum Kawin	32.09	35.34
2. Kawin	63.32	60.40
3. Cerai Hidup	2.78	2.57
4. Cerai Mati	1.82	1.69

Sumber : BPS Kota Semarang

Persentase penduduk wanita usia 15-49 tahun menurut status perkawinan memiliki pola yang sedikit berbeda dengan pola status perkawinan penduduk Kota Semarang secara keseluruhan, termasuk perkembangan antara tahun 2008 dan tahun 2009. Jika dibandingkan antar tahun terlihat bahwa wanita usia subur yang berstatus belum kawin mengalami peningkatan, sedangkan yang berstatus kawin, cerai hidup dan bersatus cerai mati mengalami penurunan.

Indikator lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan adalah umur wanita pada perkawinan pertama. Ada dua hal yang menjadi perhatian yaitu apakah umur perkawinan pertamanya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan semakin tua atau muda umur perkawinan pertama ini akan sangat berdampak pada tingkat kelahiran penduduk.

Untuk dapat mengetahui berapa rata-rata umur perkawinan pertama wanita di Kota Semarang dapat diketahui dengan suatu indikator yang

dinamakan SMAM (*singulate mean age of marriage*) yaitu rata-rata umur pada perkawinan pertama. Pada tahun 2008 nilai SMAM wanita di Kota Semarang sebesar 26,26 tahun, sedangkan pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 26,19 tahun.

Umur rata-rata perkawinan pertama yang mencapai angka diatas 25 tahun bagi wanita, erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, dan pemahaman terhadap perkawinan yang semakin baik, serta karena tuntutan ekonomi atau perkembangan jaman yang mengharuskan wanita untuk bekerja. Untuk taraf Indonesia rata-rata umur perkawinan pertama sebesar 26,82 tahun adalah cukup tinggi, dan indikator ini akan sangat berdampak pada tingkat kelahiran penduduk karena masa suburnya semakin berkurang.

Dari sisi gender perkembangan diatas memberikan arti bahwa peran wanita sudah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti, terutama pada kemampuan dan kemandirian yang sangat mempengaruhi posisi tawar wanita terhadap segala aspek kehidupan. Namun jangan terbuai dengan kondisi diatas karena nilai SMAM adalah nilai rata-rata yang tidak tertutup kemungkinan masih ada wanita yang usia perkawinan pertamanya masih muda bahkan dibawah umur minimal yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Sehingga usaha untuk memberdayakan wanita dalam segala hal agar terus ditingkatkan, karena usaha ini akan berdampak langsung pada kualitas penduduk yang dihasilkan.

Kondisi kesehatan penduduk merupakan bagian yang sangat penting dari kesejahteraan masyarakat. Sejak awal pemerintah sangat memperhatikan dan berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat dengan alasan kemanusiaan, dan karena keuntungan positif dari kesehatan baik bagi individu masyarakat maupun untuk tujuan lain yang diinginkan masyarakat. Status kesehatan masyarakat adalah indikator penting dari seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktifitas ekonomi. Anak-anak yang sehat lebih bisa datang ke sekolah, lebih bisa konsentrasi selama di sekolah dan menyerap pendidikan lebih baik. Pekerja-pekerja yang sehat akan sedikit mangkir dan akan lebih produktif selama bekerja. Ibu-ibu yang sehat akan mempunyai bayi yang sehat dan angka kematian dan kelahirannya juga rendah. Karenanya kesehatan dipandang sangat penting dilihat dari aspek non moneter.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program baik yang sifatnya promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Pemerintah memprioritaskan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat umum, dengan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah, daerah kumuh perkotaan, daerah pedesaan, daerah terpencil dan lain sebagainya. Karena pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor selain dana, misalnya pendapatan masyarakat, jarak ke lokasi pemberi pelayanan, kualitas pelayanan yang diberikan, maka tidak selalu upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah selalu memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam bagian ini indikator kesehatan yang akan dibahas adalah yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Keterbatasan dari SUSENAS tidak memungkinkan memberikan semua indikator kesehatan yang sudah dijelaskan dimuka, walaupun demikian minimal dapat membantu memberikan gambaran kasar status kesehatan dan perilaku hidup sehat dimasyarakat Kota Semarang.

1. Keluhan Kesehatan

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, status kesehatan memberi pengaruh pada tingkat produktifitas.

Pada tahun 2009 status kesehatan penduduk tergambar dari angka kesakitan (persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan) yang mencapai 39,74 persen. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penduduk Kota Semarang pernah mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan tersebut meliputi beberapa penyakit antara lain: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lainnya.

Tabel 4. Persentase penduduk yang pernah mengalami keluhan kesehatan

Jenis Kelamin	2008	2009
(1)	(2)	(3)
1. Laki-laki	38.01	39,15
2. Perempuan	37.69	40,33
3. Laki-laki + Perempuan	37.85	39,70

Sumber : BPS Kota Semarang

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kondisi kesehatan penduduk pada tahun 2009 tampak sedikit lebih buruk bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Penolong Kelahiran

Dalam proses kelahiran tenaga penolong pada persalinan sangat menentukan keberhasilan persalinan maupun pengaruhnya terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Program pemerintah mengarahkan lebih ditingkatkannya pertolongan persalinan oleh tenaga yang profesional yaitu tenaga kesehatan. Proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan program pemerintah tersebut.

Tabel 5. Persentase Balita menurut penolong kelahiran

Penolong Kelahiran	2008	2009
(1)	(2)	(3)
1. Dokter	38.60	42.53
2. Bidan	60.49	56.12
3. Tenaga Medis Lain	0.43	0.42
4. Lainnya	0.48	0.92

Sumber : BPS Kota Semarang

Pada tahun 2009, proporsi balita menurut penolong kelahiran dari tenaga medis sudah mencapai 99,15 persen, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa masyarakat Kota Semarang sudah memahami akan makna kesehatan terutama pada saat menentukan siapa penolong persalinan. Disamping itu hal ini juga disebabkan oleh semakin banyaknya pertumbuhan tempat maupun tenaga medis penolong persalinan dan juga akses maupun pelayanan yang semakin baik serta menyediakan fasilitas yang semakin terjangkau oleh kemampuan masyarakat. Bila kita lihat pada tabel 5, persentase proses kelahiran bayi yang ditangani oleh dokter meningkat dari 38,60 persen pada tahun 2008 menjadi 42,53 persen, sedangkan kelahiran yang ditangani bidan sedikit mengalami penurunan yakni 60,49 persen pada tahun 2008 menjadi 56,12 persen pada tahun 2009. Sedangkan penanganan kelahiran yang dilakukan oleh tenaga medis lain relatif tidak mengalami perubahan pada periode 2008-2009, dan penanganan persalinan oleh tenaga lainnya

mengalami peningkatan yakni 0,48 persen pada tahun 2008 menjadi 0,85 pada tahun 2009.

3. Keluarga Berencana

Informasi keluarga berencana memberikan pengertian kepada pasangan suami istri mengenai usia terbaik hamil pertama kali, kapan berhenti melahirkan, berapa tahun jarak ideal antara anak yang satu dengan berikutnya dan jumlah anak yang ideal. Pasangan usia subur hendaknya paham bahwa kehamilan bagi istri yang terlalu muda dan terlalu tua tidaklah baik bagi kesehatan bayi maupun wanita tersebut. Wanita yang belum berusia 20 tahun belum siap untuk hamil, baik dari segi fisik maupun psikis. Kemungkinan besar bayi yang lahir akan menderita berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu berat badan bayi pada saat lahir kurang dari 2.500 gram. Begitu pula bila kehamilan terjadi pada wanita usia 35 tahun keatas, resiko kematian juga tinggi baik untuk Ibu maupun janinnya.

Tabel 6. Persentase Wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin menurut partisipasi Keluarga Berencana.

Alat Kontrasepsi	2008	2009
(1)	(2)	(3)
1. MOW/Tubektomi	8.12	7.02
2. MOP/Vasektomi	0.97	2.44
3. IUD	10.26	4.27
4. Suntik	53.09	55.03
5. Susuk	4.35	3.84
6. Pil	17.57	21.30
7. Kondom	3.77	3.05
8. Lainnya	1.86	3.05

Sumber : BPS Kota Semarang

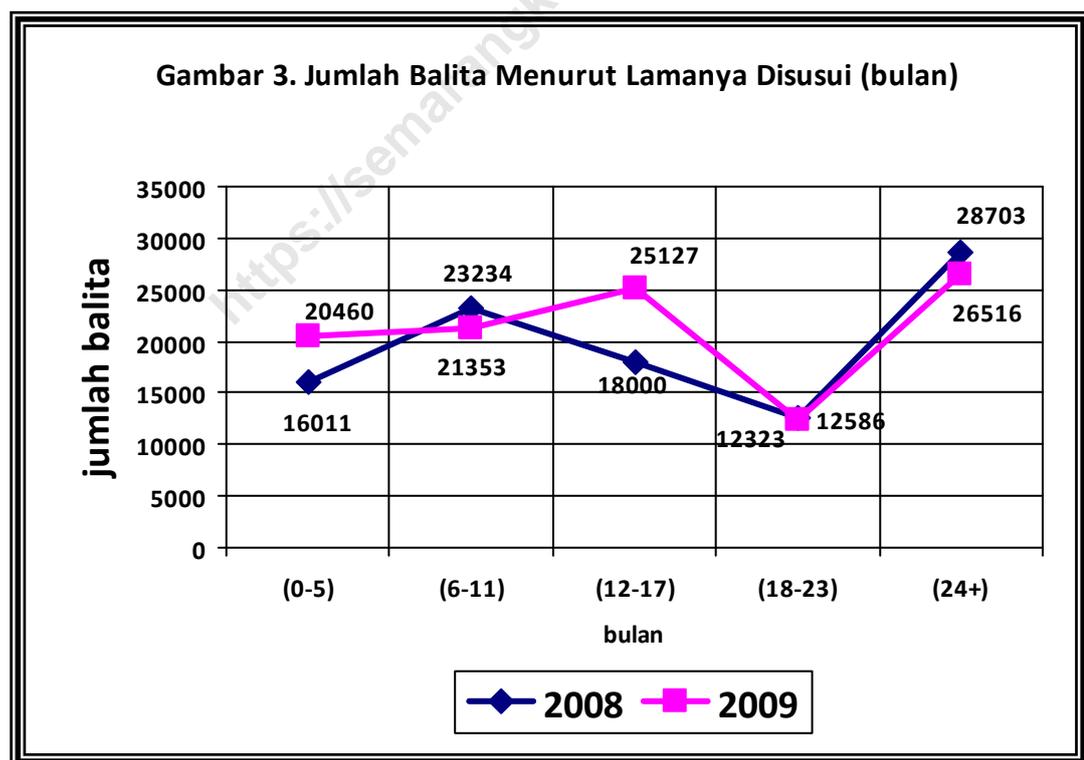
Minat masyarakat Kota Semarang terhadap alat/cara KB masih cukup tinggi. Tabel 6. Menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen wanita umur 15-49 pemakai alat/cara KB telah menggunakan alat kontrasepsi yang efektif. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa pengetahuan dan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam keluarga berencana sudah cukup tinggi, dengan demikian sangat berdampak pada kesehatan masyarakat pada umumnya dan kualitas masyarakat pada khususnya.

Peran serta kaum pria terhadap partisipasi keluarga berencana masih sangat kecil, hal ini terlihat dari 2 (dua) alat kontrasepsi untuk pria yakni MOP dan kondom hanya mencapai masing-masing sebesar 2,44 persen dan 3,05 persen pada tahun 2009, namun demikian bila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengguna MOP/vasektomi sudah mengalami peningkatan.

4. Balita dan Ibu Menyusui

Pada umumnya ibu-ibu menyusui bayinya sampai usia dua tahun, namun banyak dijumpai ibu-ibu yang memberikan makanan tambahan terlalu dini, dibawah usia 4 bulan. Hal ini kurang dimengerti oleh para ibu bahwa kebutuhan gizi bayi 0-4 bulan cukup dengan ASI saja (gizi ibu menyusui terpenuhi menggunakan pola makan gizi seimbang). Alat cerna bayi (0-4) bulan baru dapat menerima makanan cair jadi belum siap untuk mencerna makanan padat. Pola pemberian ASI 0-4 bulan tanpa makanan tambahan pendamping ASI/minuman apapun termasuk air putih dikenal dengan istilah ASI Eksklusif.

Para ibu harus mengetahui bahayanya terhadap kesehatan bayi bila bayi diberi makan makanan tambahan terlalu awal. Bayi amat rawan terhadap penyakit infeksi, sehingga kalau diberi makanan tambahan terutama yang kurang higienis bayi akan mudah jatuh sakit. Bayi yang diare terutama disebabkan oleh makanan tambahan yang tidak higienis, dan apabila bayi sering diare akibatnya akan menderita kurang gizi. Padahal diketahui bahwa ASI cukup memenuhi seluruh kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang sampai umur 4 bulan, oleh sebab itu bayi pada usia 0-4 bulan tidak memerlukan makanan tambahan.



Terhadap bayi yang baru lahir, ASI harus terus langsung diberikan. ASI yang keluar pada hari-hari pertama yaitu sejak bayi dilahirkan sampai 5

hari disebut kolostrum. Kolostrum ini mengandung kaya zat-zat gizi dan zat kekebalan tubuh yang melindungi bayi terhadap berbagai penyakit infeksi. Karena itu kolostrum jangan dibuang tetapi harus diberikan kepada bayi.

Sesudah umur 6 bulan, ASI tidak lagi mencukupi seluruh kebutuhan bayi, karena itu bayi memerlukan makanan tambahan selain ASI yang disebut sebagai makanan pendamping ASI. Agar makanan tambahan ini dapat dikonsumsi oleh bayi dalam jumlah dan kualitas yang cukup maka perlu diperkenalkan sejak usia 4-6 bulan, dan pada usia 6 bulan dan seterusnya bayi sudah mendapat makanan tambahan disamping ASI dengan porsi dan ragam yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sesudah satu bulan ibu melahirkan, vitamin A dan pil yang mengandung zat besi perlu diberikan kepada ibu yang menyusui. Kedua macam zat gizi ini diperlukan untuk memulihkan kembali kesehatan ibu. Disamping itu ibu perlu makan makanan bergizi yang berasal dari bermacam-macam bahan makanan/penganekaragaman menu dengan pola gizi seimbang dan minum susu agar ASI yang keluar bermutu tinggi dan ibu sehat.

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Usaha ini sudah tentu bukan hanya merupakan perorangan dan bukan pula hanya merupakan usaha pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila di segi lain bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tetapi untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah dalam mengimplementasikan program pendidikan diperlukan ukuran atau indikator pendidikan yang lengkap, terarah dan handal. Indikator pendidikan paling sedikit dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Indikator input, Indikator proses dan Indikator output/dampak. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Indikator proses menunjukkan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Sedangkan indikator output adalah hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan.

1. Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas

Sebelum membahas proses dan hasil dari upaya pembangunan pendidikan, penting diungkapkan lebih dahulu keadaan peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan. Dari data pada tabel 7, bisa diperoleh beberapa indikator pendidikan yang bisa lebih memperjelas atau memudahkan pemahamannya. Indikator tersebut adalah Rasio Murid Guru. Rasio Murid Guru untuk melihat beban kerja guru dalam mengajar, disamping itu dapat pula menggambarkan mutu pengajaran dikelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid.

Tabel 7. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru menurut jenjang pendidikan Tahun 2009

Uraian	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sekolah	719	200	179
2. Jumlah Murid	155.679	71.813	71.025
3. Guru	8160	4950	5.970
Rasio Murid-Guru	19	15	12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Depag Kota Semarang

Pada tahun 2009 Rasio Murid Guru di Kota Semarang untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 19 yang berarti satu orang guru rata-rata mengajar 19 murid, untuk tingkat SLTP/MTs sebesar 15 dan tingkat SLTA/MA sebesar 12.

2. Partisipasi Sekolah

Indikator partisipasi sekolah termasuk dalam indikator proses yang dalam pembahasan disini diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 8. Nilai APK, APM menurut jenjang pendidikan Tahun 2008-2009

Uraian	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1. APK Tahun 2008	108,03	104,01	93,39
2. APK Tahun 2009	101,25	100,24	77,72
3. APM Tahun 2008	94,28	87,33	72,14
4. APM Tahun 2009	85,75	71,81	53,56

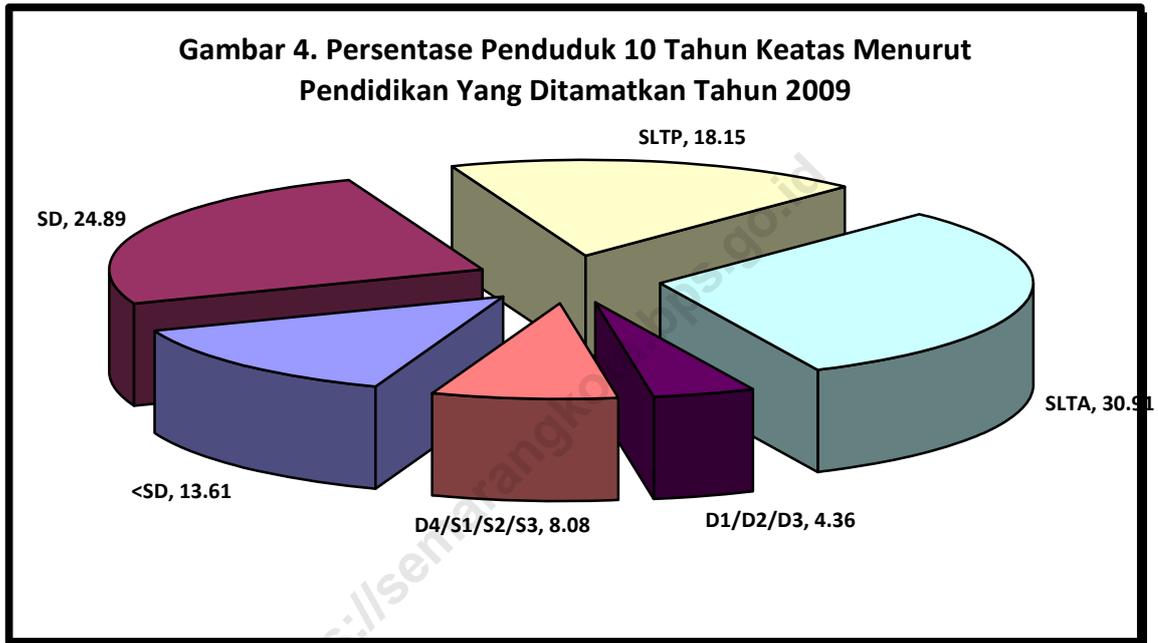
Sumber : BPS Kota Semarang

Memperhatikan angka APM tahun 2009, pada jenjang pendidikan SD mencapai 80 persen lebih, nilai ini sedikit menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Keadaan ini disebabkan karena sebagian anak usia 7-12 tahun telah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan sebagian kecil (0,33 %) diantara anak usia 7-12 tahun sudah tidak bersekolah lagi. Kondisi yang sama terjadi pula pada jenjang pendidikan SLTP maupun SLTA, sehingga mempengaruhi angka APM SLTP dan APM SLTA.

3. Kemampuan Baca Tulis dan Tingkat Pendidikan

Pada tingkat makro ukuran yang sangat mendasar dari pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Pada tahun 2008 angka melek huruf telah mencapai 95,9 persen mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 96,44 persen, yang berarti masih sekitar kurang dari 5 persen penduduk yang buta huruf dan dari 5 persen tersebut didominasi oleh penduduk berusia lanjut yang dahulu tidak pernah bersekolah. Bila dilihat menurut jenis

kelamin pada tahun 2009 angka melek huruf tidak terlihat perbedaan yang mencolok, dimana angka melek huruf untuk laki-laki sebesar 97,66 persen sedangkan untuk perempuan sebesar 93,26 persen.



Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2009 persentase penduduk umur 10 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas telah mencapai 61,5 persen, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 sebesar 62,87 persen. Indikator ini juga sering digunakan dalam menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia yang didekati dengan rata-rata lama sekolah.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran utama pembangunan ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

1. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Dilihat menurut kegiatannya pada dasarnya penduduk yang sudah berumur 15 tahun keatas dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sedang sekolah dan kegiatan lainnya misalnya mengurus rumahtangga.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi salah satunya diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK terlihat mengalami peningkatan selama periode 2008-2009, yaitu dari 63,74 persen menjadi 66,24 persen. Banyaknya angkatan kerja ini mengisyaratkan akan perlunya lapangan pekerjaan yang cukup banyak guna menampung banyaknya penawaran angkatan kerja. Bila dilihat menurut jenis kelamin seperti pada tabel 9, TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan. Besarnya TPAK laki-laki pada tahun 2008 adalah 74,64 persen naik menjadi 76,03

persen pada tahun 2009, dan TPAK perempuan yakni dari 53,39 persen menjadi 56,93 persen.

Disamping itu indikator lain yang cukup penting dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran, dimana dapat menunjukkan sampai sejauh mana angkatan kerja yang ada terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja pada tahun 2009 sebesar 10,66 persen sedangkan pada tahun 2008 sebesar 11,51 persen. Bila dirinci menurut jenis kelamin, keduanya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 12,41 menjadi 11,28 untuk tingkat pengangguran terbuka dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan tingkat pengangguran untuk jenis kelamin perempuan yakni dari 10,32 menjadi 9,88 di tahun 2009.

Hal ini menjadi indikasi bahwa jumlah penduduk perempuan yang masuk kedalam pasar kerja semakin banyak, namun masih rendah dalam ketrampilan sehingga penyerapan tenaga kerja perempuan masih cukup banyak. Disamping itu permintaan dan jenis lowongan pekerjaan untuk tenaga perempuan masih relatif terbatas, sehingga persaingan yang terjadi cukup tajam, yang pada akhirnya tenaga kerja trampil saja yang bisa diterima bekerja.

Tabel 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator		2008	2009
(1)		(2)	(3)
TPAK	Laki-laki	74,64	76,03
	Perempuan	53,39	56,93
	Total	63,74	66,24
TPT	Laki-laki	12,41	11,28
	Perempuan	10,32	9,88
	Total	11,51	10,66

Sumber : BPS Kota Semarang

2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu juga biasa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Lapangan usaha atau sektor yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kota Semarang pada tahun 2009 adalah sektor perdagangan (29,15 %) kemudian sektor jasa-jasa (28,89 %) dan sektor industri (19,65 %). Banyaknya penduduk yang bekerja di ketiga sektor utama tersebut sebesar (77,69 %) bisa dipahami mengingat Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat kegiatan perdagangan, jasa dan industri.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan utamanya, sumber data yang digunakan adalah hasil pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional.

Status pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk Kota Semarang pada tahun 2009 dapat diurutkan sebagai berikut: sebanyak 65,29 persen dari total penduduk yang bekerja menyangkut status pekerjaan sebagai buruh/karyawan, pada urutan kedua status pekerjaan berusaha sendiri yakni sebesar 16,57 persen, urutan ketiga pekerjaan dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 5,21 persen, urutan keempat pekerjaan dengan status pekerja tetap sebesar 4,55 persen, urutan kelima pekerjaan dengan status pekerja bebas sebesar 4,22 persen dan urutan terakhir adalah pekerjaan dengan status pekerja tidak dibayar sebesar 4,16 persen.

Keterbandingan status pekerjaan penduduk tahun 2009 dengan periode sebelumnya sangat menarik untuk dicermati, antara lain: terjadi penurunan persentase pekerjaan penduduk dengan status berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap namun terjadi kenaikan persentase pada status berusaha dengan dibantu buruh tetap, terjadi penurunan persentase pekerjaan penduduk dengan status berusaha sendiri maupun pekerja tidak dibayar dan terjadi kenaikan pada pekerjaan dengan status buruh/karyawan dan pekerja bebas. Fenomena di atas mencerminkan, telah terjadi pergeseran status pekerjaan penduduk. Pergeseran status pekerjaan penduduk tersebut merupakan penyesuaian dari kondisi perekonomian tahun 2009.

Tabel 10. Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan

Status Pekerjaan	2008	2009
(1)	(2)	(3)
1. Berusaha sendiri	17,22	16,57
2. Berusaha dg dibantu buruh tdk tetap	7,02	5,21
3. Berusaha dg dibantu buruh tetap	2,98	4,55
4. Buruh/Karyawan	63,97	65,29
5. Pekerja bebas	3,97	4,22
6. Pekerja tak dibayar	4,83	4,16

Sumber : BPS Kota Semarang

Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung saja tetapi juga sebagai tempat tinggal. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berkait dengan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan merupakan faktor yang sangat penting karena dapat memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 65,38 persen rumahtangga di Kota Semarang menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri. Kemudian 8,51 persen rumahtangga dengan status mengontrak, 8,88 persen dengan menyewa/bebas sewa/dinas dan sisanya dengan status lainnya sebesar 17,23 persen.

1. Kondisi Perumahan

Atap rumah merupakan salah satu unsur rumah yang sangat vital. Tidak saja berfungsi sebagai pelindung terhadap panas matahari dan hujan, atap rumah menurut jenisnya juga berpengaruh pada kesehatan bagi penghuninya. Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 2,75 persen rumah di Kota Semarang beratapkan beton, kemudian 83,97 persen beratapkan genteng

dan 13,05 beratapkan asbes/seng. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 terlihat mengalami penurunan untuk jenis atap rumah asbes, sedangkan jenis atap selain asbes mengalami peningkatan.

Tabel 11. Persentase rumah menurut jenis atap

Jenis Atap	2008	2009
(1)	(2)	(3)
1. Beton	1,94	2,75
2. Genteng	82,30	83,97
3. Seng	0,48	0,72
4. Asbes	15,15	12,33

Sumber : BPS Kota Semarang

Jenis lantai merupakan salah satu indikator dalam menentukan rumahtangga miskin, khususnya rumah yang masih berlantai tanah. Pada tahun 2009 rumahtangga yang lantainya tanah sebesar 8,86 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya sebesar 7,15 persen

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif besar sehingga penghuninya tidak berdesakan. Pada tahun 2009 tercatat sekitar 38,10 persen rumahtangga yang tinggal dalam rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 (32,85 %)

mengalami peningkatan yang cukup berarti. Keadaan ini merupakan salah satu pola hidup di perkotaan yang kepadatan penduduk dan perumahan semakin besar.

Fasilitas air bersih merupakan salah satu indikator dalam penentuan rumahtangga miskin. Pada tahun 2009 persentase rumahtangga di Kota Semarang yang menggunakan air kemasan dan ledeng sebesar 66,66 persen, sedangkan sisanya menggunakan air dari sumur, mata air dan lain-lain.

Tabel 12. Beberapa Indikator Kualitas Rumah

Indikator Kualitas Rumah	2008	2009
(1)	(2)	(3)
1. Luas Lantai < 50 m ²	32,85	38,10
2. Lantai bukan tanah	92,85	91,14
3. Atap Beton/genteng	84,24	86,71
4. Dinding tembok	86,42	88,98
5. Penerangan Listrik	99,64	99,75
6. Air Minum ledeng/air kemasan	70,06	66,66
7. Jamban sendiri dg tanki septic	70,30	62,72

Sumber : BPS Kota Semarang

2. Kualitas Perumahan

Kualitas perumahan di Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki rumah layak huni. Bila dilihat dari kualitas bangunan yang digunakan kondisinya mengalami peningkatan kualitas, yang dilihat dari semakin banyaknya rumah tinggal dengan atap layak dan tembok yang permanen.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas penghuninya. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih/leding, serta jamban sendiri dengan tanki septik.

Pada tahun 2009 hampir semua rumahtangga (99,75 persen) sudah menggunakan listrik sebagai alat penerangannya. Sedangkan akses rumahtangga pada air leding sudah lebih dari 60 persen. Untuk ketersediaan jamban sendiri dengan tanki septik, ternyata pada tahun 2008 mencapai 70,30 persen rumahtangga sudah menggunakannya, namun angka ini menurun bila dibandingkan dengan keadaan tahun ini yang hanya mencapai 62,72.

<https://semarangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, 50132 telp (024)3546413 E-mail : bps3374@mailhost.bps.go.id